

BAB IV

ALASAN PARTAI UNITED KINGDOM INDEPENDENCE PARTY (UKIP) MENGINGINKAN INGGRIS KELUAR DARI UNI EROPA DALAM REFERENDUM INGGRIS 2016

Dalam BAB IV ini penulis akan membahas terkait alasan Partai UKIP menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dalam referendum Inggris tahun 2016. Pembahasan dalam BAB ini terbagi menjadi dua bagian, dalam bagian pertama penulis akan menjawab rumusan masalah dengan teori *voting behavior* dengan dua model yaitu model pilihan rasional dan model ideologi dominan. Selanjutnya pada bagian kedua penulis akan menjawab rumusan masalah menggunakan teori realis John J Mearsheimer dengan asumsinya terkait institusi internasional yaitu tujuan suatu negara dalam institusi internasional ialah untuk survival dan negara harus bertindak strategis dalam institusi internasional.

A. Isu Brexit Sebagai Alat Kampanye Untuk Meningkatkan Suara

Partai UKIP Dalam Pemilihan di Inggris

Berdasarkan teori *voting behavior* yang dijelaskan oleh Andrew Heywood dalam karyanya berjudul *Politics*, ada beberapa faktor yang akan menentukan perilaku pemilih untuk menentukan pilihannya terhadap suatu pemilihan, faktor yang mempengaruhi tersebut terdiri dari empat model yaitu : pertama model sosiologi,

model ini mempercayai bahwa perilaku memilih seseorang ditentukan oleh latar belakang dan karakter sosiologinya seperti agama, kelas, bahasa, ras dan daerah tempat tinggalnya. Model sosiologi menunjukkan bahwa pemilih cenderung mengadopsi pola voting yang mencerminkan posisi ekonomi dan sosial dari kelompok mana mereka berasal.

Kedua model identifikasi partai atau model sosial-psikologis memiliki pandangan bahwa preferensi politik seseorang dalam memilih bukan hanya ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Rasa kedekatan dan kepercayaan terhadap partai tertentu sangat menentukan pilihan pemilih dalam suatu pemilihan umum. Ketiga model pilihan rasional, model ini memiliki pandangan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh penilaian terhadap keadaan ekonomi, sosial dan politik di tingkat individu dan di tingkat lokal, regional dan nasional. Dalam pandangan model ini, *voting* dianggap sebagai tindakan yang rasional, artinya bahwa perilaku pemilih diyakini memutuskan pilihan partai mereka atas dasar kepentingan pribadi. Para pemilih berperilaku seperti konsumen mengekspresikan pilihan antara pilihan kebijakan yang tersedia (Heywood, 2007). Keempat model ideologi dominan maksudnya ialah para pemilih akan cenderung memilih partai ataupun kandidat yang memiliki kesamaan ideologi, dalam membangun *image* politik banyak partai yang membangun basis masa berdasarkan latar belakang kesamaan gagasan atau ideologi.

Dalam mempengaruhi perilaku pemilih untuk memberikan suaranya kepada Partai UKIP, maka ada beberapa model yang bisa dijadikan acuan untuk

meningkatkan elektabilitas UKIP dengan membangun isu *Brexit*, yaitu model pilihan rasional dan model ideologi dominan.

1. Model Pilihan Rasional : Brexit Akan Membawa Masyarakat Inggris Menjadi Lebih Sejahtera

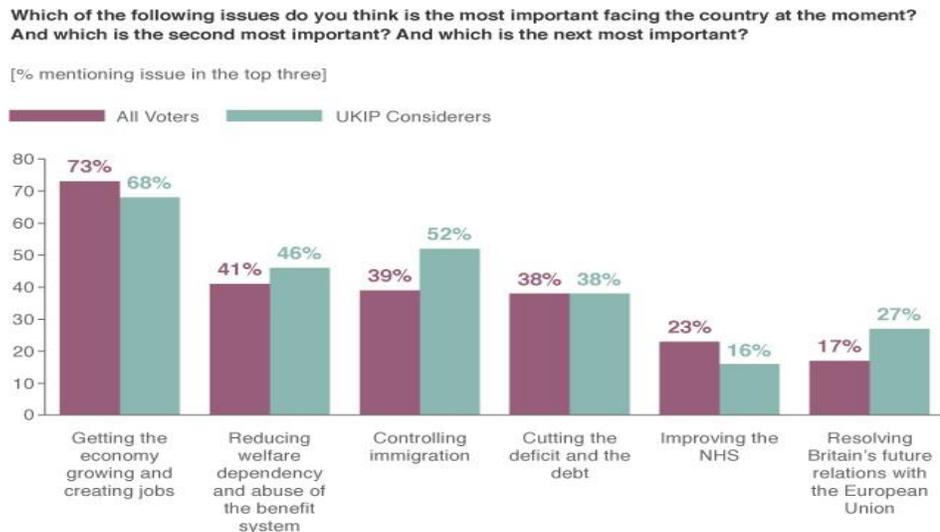
Salah satu keberhasilan Partai UKIP bisa menjadi salah satu partai yang dipertimbangkan dalam pemilu di Inggris pada saat ini yaitu, karena Partai UKIP bisa mengolah isu kampanye yang dianggap oleh masyarakat Inggris sebagai kampanye yang rasional, sehingga atas dasar rasional tersebut banyak masyarakat Inggris yang mulai memberikan kepercayaan terhadap Partai UKIP. Salah satu faktor kebangkitan UKIP ialah karena partai ini secara konsisten menjadikan isu *Brexit* sebagai tema utama dalam berkampanye, Partai UKIP sendiri merupakan partai dengan ideologi *euroskeptics* yang menginginkan Inggris berpisah dengan Uni Eropa, namun UKIP mulai gencar mengkampanyekan agar Inggris keluar dari Uni Eropa pada tahun 2009 hingga referendum Inggris 2016, ketika itu pemimpin partai ialah Nigel Farage yang memang dikenal sebagai tokoh pencetus *Brexit* (Hunt, 2014).

Dalam mengkampanyekan isu *Brexit* di Inggris, Partai UKIP memiliki slogan yang memiliki daya tarik bagi masyarakat Inggris yaitu “*Take Back Control Of Our Country*”, kalimat ini dijadikan slogan kampanye Partai UKIP sejak mereka memulai mengkampanyekan *Brexit* di tahun 2009, dari slogan tersebut dapat dimaknai sebagai keinginan Partai UKIP untuk mengambil kedaulatan negaranya yang dianggap telah diambil oleh Uni Eropa, karena sejak bergabung dengan Uni Eropa Inggris tidak bisa

menentukan kebijakan dalam negerinya secara bebas. Slogan tersebut telah terbukti bisa memikat hati masyarakat Inggris terhadap partai UKIP, selain itu masih ada slogan lainnya yaitu “ *Take Back Control Of Our Borders*”, slogan tersebut memiliki makna agar Inggris bisa kembali menentukan kebijakan imigrasinya sendiri tanpa campur tangan Uni Eropa, dapat ditarik benang merah dari kedua slogan tersebut yaitu keinginan untuk Inggris keluar dari Uni Eropa atau disebut *Brexit*.

Kampanye yang dilakukan oleh Partai UKIP juga banyak menawarkan kesejahteraan kepada masyarakat Inggris, dengan tetap fokus terhadap isu utama yaitu Brexit, karena menurut Partai UKIP dengan keluarnya Inggris dari Eropa akan membawa masyarakat Inggris ke arah yang lebih sejahtera, kampanye retorik yang biasa dilakukan oleh Nigel Farage agar Inggris keluar dari Uni Eropa dengan memberikan alasan yang rasional juga memberikan dampak positif, karena itu merupakan salah satu alasan kenapa masyarakat mulai mempercayai Partai UKIP, dalam retorikanya Nigel Farage selalu menyinggung terkait perbaikan pelayanan kesehatan nasional, menciptakan lapangan pekerjaan di Inggris bagi masyarakat Inggris dan kontrol terhadap imigrasi, itu sebabnya masyarakat Inggris merasa diuntungkan apabila kebijakan UKIP bisa terwujud, berikut bagan intensitas isu-isu penting yang dipopulerkan oleh Partai UKIP dalam menghadapi kondisi yang ada di Inggris :

Gambar 4.1 Grafik Intensitas Isu Sentral yang Menjadi Konsen Partai UKIP



Sumber : lordashcoftpolls.com, *The Important Issues in UK, Published 2016*

Dalam bagan diatas terlihat bahwa mayoritas kampanye yang dilakukan oleh Partai UKIP membahas terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, isu ini jelas menjadi daya tarik bagi masyarakat Inggris karena bagi mereka kebijakan UKIP akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Inggris (Ashcroft, 2012). Isu lainnya yang menjadi fokus UKIP ialah terkait kontrol imigrasi dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Inggris.

Berdasarkan survey sebanyak 96 persen anggota Partai UKIP menginginkan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, presentase tersebut merupakan yang paling besar dibandingkan partai lainnya, hanya Partai UKIP yang secara terang-terangan menginginkan Inggris berpisah dengan Uni Eropa (Ashcoft, 2016). Oleh karena itu isu *Brexit* merupakan momentum yang tepat bagi UKIP untuk meningkatkan

elektabilitas suara partai. Dalam pemilihan lokal di Inggris pasca UKIP mengkampanyekan agar Inggris keluar dari Uni Eropa pertama kalinya yaitu tahun 2009, Partai UKIP mengalami peningkatan dengan keberhasilannya merebut beberapa kursi, karena bagi Farage pimpinan UKIP saat itu dengan membangun basis masa di daerah-daerah sangatlah penting untuk menunjang suara dalam pemilihan nasional. Pada pemilihan lokal 2011, UKIP mengumpulkan sebanyak 1.100 kandidat dan berhasil meloloskan 7 kandidat, kemudian pada pemilihan lokal 2013 Partai UKIP membuat kejutan dengan memenangkan 147 kursi dan menempatkan dirinya sebagai oposisi terbesar di enam majlis yang ada di Inggris (Goodwin, 2015). Suara Partai UKIP terus maningkat dalam pemilu lokal berikutnya, pada saat pemilu lokal tahun 2014 Partai UKIP berhasil mendapatkan lebih dari 150 kursi dan menjadi partai dengan dewan terbesar keempat di Inggris, pada tahun 2015 dalam pemilihan dewan Inggris Partai UKIP berhasil meloloskan 202 kursi, sementara pada pemilu lokal 2016 UKIP berhasil mendapatkan 58 kursi dewan (BBC, 2016). Meskipun Partai UKIP tidak mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi pemilih yang memberikan suaranya terhadap partai UKIP terus mengalami peningkatan.

Keberhasilan Partai UKIP membuat kejutan dalam pemilihan di Inggris tidak hanya dalam pemilihan lokal saja, akan tetapi dalam pemilihan lainnya seperti dalam pemilihan umum Parlemen Eropa, Partai UKIP berhasil mencatatkan sejarahnya dalam perpolitikan Inggris, yaitu pada tahun 2014 Partai UKIP berhasil mendapatkan kemenangan terbesar dalam perolehan suara untuk pemilihan Parlemen Eropa, UKIP

berhasil mendapatkan 24 kursi untuk Parlemen Eropa dengan perolehan suara sebanyak 27,49 persen atau mendapatkan suara sebanyak 4.376.635, dalam pemilu tersebut UKIP berhasil mengalahkan dua partai besar di Inggris yaitu Konservatif dan Buruh, posisi kedua ditempati Partai Buruh dengan suara sebanyak 25,40 persen dan disusul Partai Konservatif dengan suara sebanyak 23,93 persen (BBC, 2015).

Selain itu Partai UKIP juga berhasil mencatatkan sejarah pada pemilihan umum tahun 2015, dimana dalam pemilihan tersebut untuk pertama kalinya Partai UKIP bisa mendapatkan kursi di Parlemen Inggris atau *House Of Commons*, kandidat UKIP yang berhasil mendapatkan kursi di Parlemen Inggris ialah Douglas Carswell perwakilan dari wilayah Clacton, dalam pemilihan tersebut UKIP berhasil mendapatkan suara sebanyak 3.881. 099 atau 12,6 persen (The Guardian, 2015). perolehan suara Partai UKIP meningkat sangat drastis apabila dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya, pada tahun 2010 Partai UKIP hanya mendapatkan suara sebanyak 919. 546 atau 3,1 persen saja. Peningkatan suara yang diterima oleh Partai UKIP merupakan keberhasilan partai dalam berkampanye, terutama dengan membawa isu *Brexit* secara konsisten yang terbukti dapat mempengaruhi perilaku pemilih secara signifikan.

2. Model Ideologi Dominan : Mayoritas Pemilih Mendukung UKIP

Karena UKIP Merupakan Partai *Euroskeptic*

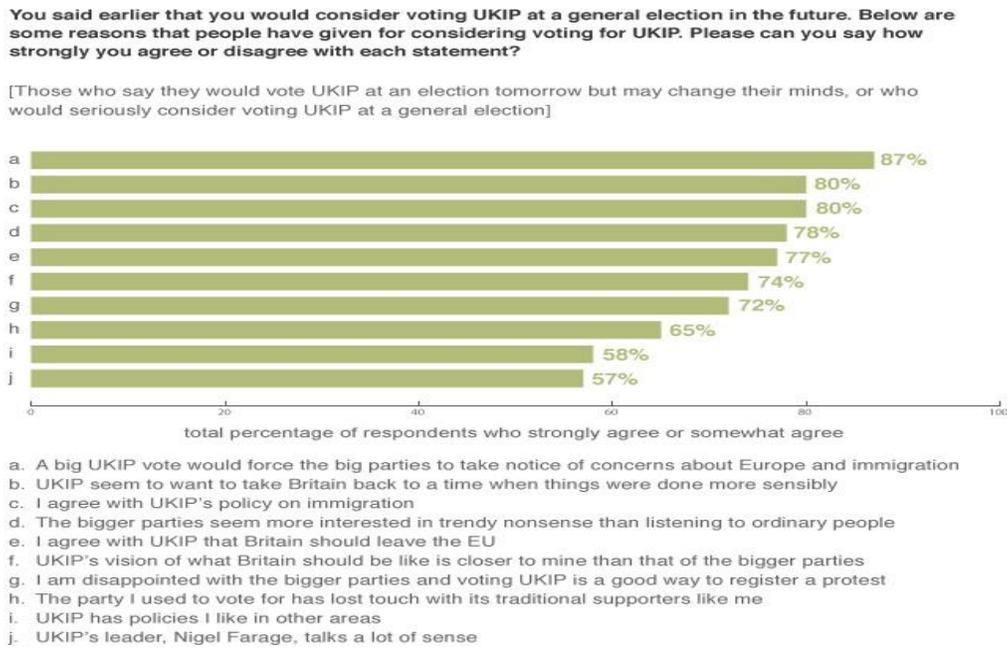
Kelompok *euroskeptics* pada awalnya muncul di Inggris ketika Perjanjian Maastrich pada tahun 1992 di tetapkan oleh anggota-anggota Uni Eropa, ada beberapa kalangan di Inggris yang menolak perjanjian tersebut karena beberapa alasan, diantaranya yaitu penolakan terhadap mata uang tunggal atau zona euro, selain itu alasan lainnya ialah karena dalam perjanjian tersebut kekuatan politik Uni Eropa semakin kuat dan bisa mengancam kedaulatan Inggris. Setelah ada penolakan terhadap perjanjian tersebut akan tetapi pemerintah tetap meratifikasinya meskipun ada pengecualian terhadap mata uang tunggal, hal tersebut menimbulkan kekecewaan terhadap pemerintah dan penolakan terhadap Uni Eropa, sikap mereka yang menolak Uni Eropa tersebut disebut sebagai *euroskeptics*.

Pandangan *euroskeptics* di Inggris terus berkembang sampai saat ini, kepercayaan masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa semakin melemah akibat kegagalan-kegagalan Uni Eropa untuk membawa kawasan Eropa lebih terintegrasi lebih merata, hal ini dibuktikan setelah adanya krisis global tahun 2008 dan krisis Yunani yang bisa berakibat buruk bagi negara Eropa lainnya, Uni Eropa gagal menangani krisis yang terjadi di kawasan tersebut dengan cepat, sehingga banyak masyarakat yang mulai pesimis terhadap Uni Eropa, selain itu bagi masyarakat Inggris Uni Eropa bukanlah institusi yang demokratis bagi mereka, karena beberapa kali Inggris dipaksa untuk mengikuti kebijakan yang dibuat Brusell dan kurang

mendukung kepentingan nasional Inggris. Menurut survey dari *Natcen Social Research* tahun 2015 mengatakan 63 persen dari masyarakat Inggris ialah *euroskeptics*, diartikan sebagai keinginan masyarakat untuk meninggalkan Uni Eropa atau mengurangi kekuatan Uni Eropa, namun ketika pilihannya meninggalkan atau tetap bergabung dalam Uni Eropa hasilnya ialah 57 persen menginginkan tetap dan 35 persen menginginkan pergi (Briggs, 2015).

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam BAB dua oleh penulis, bahwa Partai UKIP didirikan oleh Alan Sked yang merupakan tokoh *euroskeptics*, maka salah satu ideologi Partai UKIP adalah *euroskepticism*, salah satu tujuan UKIP ialah menceraikan Inggris dengan Uni Eropa. Partai UKIP berhasil memanfaatkan momentum untuk menarik simpati dari masyarakat Inggris dengan secara konsisten mendorong terjadinya *Brexit*, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Partai UKIP dalam membangun isu sentral yang tepat sehingga sangat mempengaruhi perkembangan Partai UKIP dalam pemilihan di Inggris, banyak warga Inggris yang mulai mempercayakan suaranya terhadap Partai UKIP, berikut statistikas alasan masyarakat Inggris memberikan suaranya terhadap Partai UKIP :

Gambar 4.2 Statistika Alasan pemilih memberikan suaranya kepada UKIP



Sumber : lordashoftpolls.com, reason voting for UKIP, published December 2016

Berdasarkan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Inggris memberikan suaranya terhadap Partai UKIP ialah karena UKIP merupakan partai yang konsen membahas Eropa dan Imigrasi dengan presentase sebanyak 87 persen (Ashcroft, 2012). Selain itu, alasan masyarakat Inggris menginginkan keluar dari Uni Eropa karena mereka menginginkan segera keputusan yang menyangkut Inggris harus diputuskan oleh Inggris sendiri, alasan tersebut merupakan suara terbanyak dengan presentase 49 persen, disusul alasan kontrol imigrasi sebanyak 33 persen (Ashcoft, 2016). Mengkampanyekan *Brexit* dengan mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa dan mengurangi tingkat imigrasi di Inggris telah membuktikan bahwa kampanye yang dilakukan oleh UKIP sangat berhasil dalam mempengaruhi perilaku

pemilih, sehingga dalam beberapa pemilihan di Inggris baik lokal ataupun nasional, suara Partai UKIP mengalami peningkatan bahkan secara tidak terduga bisa mengalahkan suara partai besar di Inggris. Dari presentase diatas menunjukkan bahwa ideologi Partai UKIP yang *euroskeptics*, telah berhasil mempengaruhi perilaku pemilih untuk memberikan suaranya kepada UKIP, disisi lain menunjukkan bahwa paham *eroskepticism* telah mengalami kebangkitan di Inggris.

B. Pertimbangan Rasional Partai UKIP Bahwa Bergabung Dengan Uni Eropa Akan Merugikan Inggris

Dalam memandang organisasi internasional saat ini kita bisa melihat menggunakan perspektif realisme, pandangan realisme merupakan salah satu pandangan klasik dalam ilmu hubungan internasional namun hingga saat ini asumsi-asumsi dari perspektif ini masih relevan untuk digunakan dalam memandang suatu fenomena internasional. Teori realisme yang ditulis oleh John J Mearsheimer dalam karyanya berjudul *The False Promise of International Institutions* merupakan salah satu pandangan yang bisa menjadi rujukan untuk memandang fenomena organisasi internasional, dalam karyanya tersebut Mearsheimer memaparkan bahwa ada lima asumsi dasar dari pandangan realis terhadap organisasi internasional yaitu pertama, sistem internasional itu bersifat anarki, kemudian tidak adanya kedaulatan tertinggi selain negara sehingga setiap negara pasti akan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan, hal ini mengakibatkan setiap negara yang terlibat dalam organisasi

internasional akan saling berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dan mengakibatkan sulit agar saling percaya satu sama lain.

Kedua, negara memiliki kapasitasnya untuk membangun kekuatan militernya, sehingga ada kekhawatiran suatu negara akan menyerang negara lainnya, dalam pandangan realis kekuatan militer suatu negara merupakan instrument penting dalam membangun kekuatan negara, kekuatan militer dapat digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya meskipun harus dengan cara menyerang negara lain. Ketiga, suatu negara tidak mengetahui apa-apa yang sudah direncanakan oleh negara lain, negara juga tidak mengetahui intensitas interaksi suatu negara dengan negara lainnya sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi satu negara terhadap negara lainnya. Keempat, tujuan utama suatu negara yaitu untuk survival, setiap negara ingin mempertahankan kedaulatannya, dalam organisasi internasional meskipun memiliki tujuan bersama bagi negara-negara anggotanya, tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya setiap negara akan mendahulukan kepentingan nasional negaranya dibandingkan kepentingan organisasi sehingga pemenuhan kebutuhan negara inilah yang akan diutamakan agar negara tersebut bisa bertahan dalam sistem internasional. Kelima, suatu negara harus bertindak strategis untuk bertahan dalam sistem internasional, negara merupakan aktor rasional sehingga dalam membuat keputusan harus menjunjung rasionalitas bagi negaranya, artinya dalam setiap keputusan harus ada alasan rasional yang menguntungkan bagi negaranya.

Asumsi-asumsi dari realisme John J Mearsheimer tersebut banyak dijadikan acuan untuk melihat fenomena hubungan suatu negara dalam organisasi internasional, dalam hal ini Partai UKIP mendorong Inggris agar keluar dari Uni Eropa dalam referendum Inggris 2016 memiliki kesamaan dengan asumsi-asumsi dari realisme tersebut, pada saat ini Partai UKIP memiliki alasan yang rasional untuk mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa yang sesuai dengan asumsi realis John J Merasheimer, namun hanya pada dua asumsi saja, yaitu asumsi keempat mengenai tujuan utama suatu negara untuk *survival*, dan asumsi kelima terkait suatu negara harus bertindak strategis.

1. Inggris Tidak Bisa Membuat Kebijakan Nasionalnya Sendiri Karena Terikat Dengan Kebijakan Uni Eropa

Salah satu tujuan utama negara dalam hal bergabung dengan organisasi internasional yaitu untuk bisa bertahan dalam sistem internasional termasuk mempertahankan kedaulatan negaranya, Inggris bergabung dengan Uni Eropa yang pada waktu itu bernama Masyarakat Ekonomi Eropa tentunya memiliki tujuan yaitu dalam hal ekonomi dan politik. Inggris sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa tentunya harus membantu dalam mencapai tujuan bersama yang dirumuskan oleh Uni Eropa, namun seiring berjalannya waktu Inggris merasa tidak nyaman dengan keharusan melaksanakan seluruh kebijakan Uni Eropa hal ini dikarenakan seolah-olah Inggris didikte oleh Uni Eropa dan tidak leluasa untuk menentukan kebijakan internalnya. Inggris mengklaim sejak berdirinya Uni Eropa sampai saat ini telah

menghasilkan 400 undang-undang, sebagai negara anggota Inggris terpaksa untuk melaksanakan undang-undang aliansi tersebut (Irib Wold Service, 2014). Partai UKIP memandang semakin besarnya intervensi Uni Eropa terhadap permasalahan internal di Inggris telah mereduksi kedaulatan negara Inggris.

Partai UKIP memandang keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada saat ini telah membuat Inggris tidak bebas dan tidak bisa menentukan kebijakannya secara berdaulat, Partai UKIP menginginkan negara Inggris yang berdaulat secara keseluruhan hal ini ditegaskan melalui pernyataan pimpinan UKIP sebagai berikut :

"Now there are 17 million people that voted for Brexit. It's a victory for ordinary people, decent people. It's a victory against the big merchant banks, against the big businesses and against big politics. The EU is failing, the EU is dying. I hope we've knocked the first brick out of the wall. I hope this is the first step towards a Europe of sovereign nation states". Nigel Farage (Reuters, 2016).

Pandangan Partai UKIP tersebut sesuai dengan salah satu asumsi John J Mearsheimer dimana tujuan utama suatu negara dalam organisasi internasional adalah untuk mempertahankan kedaulatannya, pada faktanya saat ini kebijakan Uni Eropa telah banyak mengintervensi kebijakan nasional Inggris, sehingga Partai UKIP menginginkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa dengan alasan Uni Eropa telah mereduksi kedaulatan Inggris, alasan tersebut merupakan alasan rasional kenapa Inggris harus keluar dari Uni Eropa.

Hubungan yang kurang harmonis antara Inggris dan Uni Eropa sebenarnya berawal dari perjanjian Maastrich pada tahun 1992, dalam perjanjian itu

menginginkan adanya mata uang tunggal dikawasan Eropa yang saat ini bernama *euro*, akan tetapi Inggris menginginkan tetap menggunakan mata uang negaranya yaitu *poundsterling* karena Inggris menilai apabila suatu saat *euro* mengalami krisis maka akan memberikan efek kepada negara lain oleh karena itu Inggris menolak menggunakan mata uang tunggal. Selain berisi mengenai mata uang tunggal, perjanjian tersebut juga memperluas pengaruhnya di bidang politik dengan membentuk institusi supranasional Uni Eropa seperti komisi dan prlemen Eropa, beberapa kalangan di Inggris termasuk pendiri Partai UKIP yaitu Alan Sked menolak ekspansi Uni Eropa tersebut, karena dinilai akan semakin mempengaruhi kebijakan dalam negri Inggris.

Sejak pertama Inggris masuk Uni Eropa sampai sekarang ini jumlah hukum nasional Inggris yang dipengaruhi oleh hukum produk Uni Eropa masih dalam perdebatan, berdasarkan data dari database *Statute Law* dari tahun 1980 sampai akhir tahun 2009 Inggris telah membuat keputusan hukum sebanyak 1.302, kemudian 186 diantaranya atau 14,3 persen merupakan pengaruh dari hukum produk Uni Eropa (Miller, 2010). Uni Eropa terus mengalami perkembangan sampai saat ini sehingga apabila mengacu pada data dari *Statute Law* tersebut maka presentasi hukum Uni Eropa yang mempengaruhi hukum nasional akan meningkat, menurut data dari *House Of Commons Library* antara tahun 1993 sampai 2014, Parlemen Inggris telah membuat 945 keputusan dengan 231 diantaranya merupakan pengaruh dari Uni Eropa (Coleman, 2016). Partai UKIP dalam hal ini memberikan pandangannya melalui

ketua umum Nigel Farage terkait jumlah hukum nasional Inggris yang dipengaruhi oleh Uni Eropa, dalam debat yang dilakukan oleh salah satu TV nasional Inggris ketua umum UKIP Nigel Farage memberikan pernyataan bahwa 75 persen hukum nasional Inggris berasal dari Uni Eropa (Bloom, 2016). Data yang di ucapkan oleh Nigel Farage sangatlah tinggi dibandingkan dengan statmen politisi lainnya seperti ketua umum Partai Demokrasi Liberal Nick Clegg yang hanya 7 persen dan David Cameroon 15 persen.

Ketika Inggris memutuskan bergabung dengan Uni Eropa tentunya ada konsekuensi mendasar yang harus diterima oleh Inggris salah satunya yaitu permasalahan penyatuan antara hukum yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan hukum nasional Inggris, komitmen Inggris untuk mengikuti hukum Uni Eropa telah disahkan secara legal dalam parlemen Inggris atau disebut juga *European Communities Act* pada tahun 1972, dengan adanya ketetapan tersebut maka ketika Uni Eropa mengeluarkan ketetapan hukum maka Inggris wajib menjadikan hukum tersebut sebagai acuan dalam hukum nasional Inggris (Albors, 2016). Uni Eropa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga bisa menjadi institusi supranasional di kawasan Eropa, pada awalnya kerjasama Uni Eropa hanya dalam bidang perekonomian saja, akibatnya Inggris harus lebih banyak lagi mengimplementasikan hukum hasil produk Uni Eropa.

Proses pembuatan hukum di Uni Eropa sendiri dirumuskan oleh Komisi Uni Eropa, tugas Komisi Uni Eropa yaitu menyusun dan mengajukan undang-undang di

Uni Eropa, apabila rancangan undang-undang tersebut diterima oleh Parlemen Eropa maka rancangan tersebut dapat disahkan sebagai hukum yang berlaku. Bentuk hukum yang diproduksi oleh Uni Eropa ada beberapa macam yaitu *regulations*, *directives*, *decisions*, *recommendations*, dan *opinions* (European Union, 2017). *Regulations* yaitu keputusan legislasi yang mengikat dan harus diterapkan secara keseluruhan oleh anggota Uni Eropa, *directives* ialah keputusan legislasi yang menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh negara anggota, dalam penerapannya negara anggota diberikan kebebasan untuk membuat undang-undangnya, sedangkan *decisions* maksudnya adalah keputusan yang mengikat hanya kepada alamat yang dituju (misalnya negara Uni Eropa atau perusahaan individual) dan dapat diterapkan secara langsung.

2. Kebijakan Uang Kontribusi dan Imigrasi Uni Eropa Akan Merugikan Inggris

Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi Inggris, sebagai negara di kawasan Eropa yang sempat terlibat dalam perang dunia kedua tentunya membuat perekonomian Inggris terpuruk, oleh karena itu setelah perodesasi perang dunia berakhir Inggris ingin membangun kembali kekuatan ekonominya. Inggris sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa tentunya harus membuat kebijakan yang rasional agar mampu mencapai kepentingan nasionalnya.

Keanggotaan Inggris di Uni Eropa selain harus mengaplikasikan hukum Uni Eropa juga ada kewajiban lainnya yang harus di penuhi oleh Inggris yaitu kewajiban

membayar uang iuran keanggotaan, tentunya dengan adanya uang kontribusi tersebut akan membebani perekonomian Inggris, kalangan *eurosceptic* tentunya banyak yang menolak hal tersebut, mereka beranggapan uang yang dibayarkan untuk kontribusi Uni Eropa tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan, meskipun Uni Eropa tetap memberikan alokasi bantuan kepada Inggris dalam beberapa hal seperti uang pengembangan bidang pertanian. Bergabung dengan Uni Eropa membutuhkan uang akan tetapi apakah itu juga akan menciptakan perdagangan, investasi dan perkerjan yang memiliki nilai lebih bagi Inggris, bahkan beberapa kalangan meyakini dengan bergabungnya Inggris di Uni Eropa membuat bisnis beroperasi menjadi tidak efisien karena harus mengikuti regulasi Uni Eropa (Yulianingsih, 2016), persoalan inilah yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat dan politisi Inggris.

Tingginya uang kontribusi yang ditetapkan Uni Eropa terhadap Inggris, membuat Partai UKIP berpandangan agar uang kontribusi Uni Eropa lebih baik apabila dialokasikan untuk kepentingan nasional Inggris, karena keuntungan yang didapatkan Inggris tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan Inggris untuk Uni Eropa, Inggris bisa mengalokasikan uang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inggris seperti untuk meningkatkan pelayanan kesehatan nasional. Penolakan UKIP terhadap uang kontribusi yang besar tersebut ditegaskan oleh sikap Nigel Farage yang dengan tegas mempertanyakan untuk apa biaya sebesar 55 juta poundsterling yang dikeluarkan Inggris setiap harinya kepada Uni Eropa (Express, 2016). Sikap Nigel Farage tersebut merupakan alasan yang rasional agar Inggris

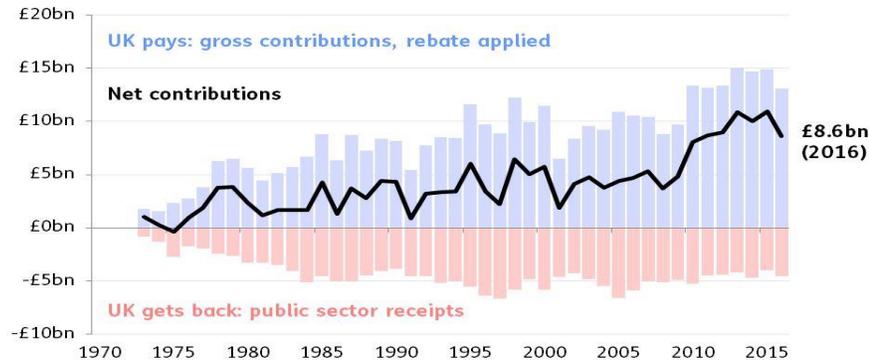
keluar dari Uni Eropa, karena Inggris sudah tidak mendapatkan manfaat lagi dari Uni Eropa maka Inggris harus bisa bertindak secara rasional, melihat persoalan tersebut UKIP mendorong Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.

Uang kontribusi yang dibayarkan ke Inggris setiap tahunnya mengalami perubahan, namun hal yang sangat disayangkan oleh Inggris ialah tidak dilibatkannya Inggris dalam memutuskan jumlah uang kontribusi, sehingga menimbulkan kesan Uni Eropa tidak demokrasi dalam menentukan jumlah uang kontribusi tersebut, Inggris merupakan salah satu kontributor keuangan Uni Eropa terbesar setelah German, Prancis dan Italy, penentuan jumlah uang kontribusi Uni Eropa disesuaikan dengan GDP masing-masing negara, German menjadi negara dengan kontributor paling tinggi untuk Uni Eropa. Pada tahun 2014 Inggris mengeluarkan biaya sekitar sebanyak 14,4 miliar poundsterling atau 280 juta pounsterling tiap minggunya untuk Uni Eropa, jumlah tersebut sudah dikurangi dengan pemasukan Inggris dari Uni Eropa sebanyak 4,6 miliar poundsterling pada tahun tersebut (Fullfact, 2016), tentunya ini bukanlah nilai yang sedikit bagi Inggris meskipun Inggris mendapatkan uangnya kembali dari Uni Eropa untuk perihal program pertanian dan pengembangan wilayah, jumlah uang kontribusi yang harus dibayar Inggris juga berbeda-beda tiap tahunnya seperti dalam statistika sebagai berikut :

Gambar 4.3 Grafik Pembayaran Uang Kontribusi Inggris kepada Uni Eropa

UK payments to EU budget

Balance of UK contributions to and public sector receipts from the EU budget, inflation-adjusted in 2016 prices, calendar years



Source: HM Treasury European Union Finances 2016, House of Commons Library analysis and HM Treasury GDP deflators (March 2017)



Dalam statistika tersebut terlihat pada tahun 2016 jumlah uang kontribusi Inggris mengalami penurunan apabila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, tahun 2016 Inggris mengeluarkan biaya sebanyak 13,1 miliar poundsterling namun Inggris mendapatkan dana dari Uni Eropa sebanyak 4,5 miliar poundsterling, jadi total biaya yang dikeluarkan Inggris pada tahun tersebut hanyalah 8,6 miliar poundsterling (Full Fact, 2017). Apabila melihat statistika tersebut, rata-rata tiap tahunnya uang kontribusi yang dikembalikan lagi ke Inggris untuk menjalankan program bersama dengan Uni Eropa sebesar 4-5 miliar poundsterling. Berdasarkan data dari *European Union Budget Office* total dana yang sudah dikeluarkan Inggris untuk Uni Eropa sebesar 11.273,41 juta poundsterling, jumlah tersebut berada pada urutan keempat setelah German, Prancis dan Italy (The Guardian, 2016).

Selain permasalahan uang kontribusi Inggris untuk Uni Eropa, Inggris juga terbebani oleh kebijakan imigrasi dari Uni Eropa, dengan bergabungnya Inggris di Uni Eropa maka ada komitmen agar sesama anggota Uni Eropa bisa membebaskan warga negaranya untuk berpindah ke negara anggota lainnya termasuk dalam mencari pekerjaan, kesepakatan tersebut disebut *freedom of movement*, ada kekhawatiran bagi Partai UKIP dengan semakin banyaknya imigran yang masuk maka akan menimbulkan permasalahan sosial seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, perumahan, pendidikan hingga pelayanan sosial. Tahun 2014 ada sekitar 260 ribu imigran yang tinggal di Inggris dan 45 ribu diantaranya merupakan imigran dari penduduk Uni Eropa, angka ini terus meningkat tiap tahunnya (JPNN, 2014). Untuk mengatasi gelombang imigrasi di Inggris muncul wacana untuk membatasi jumlah imigrasi yang masuk ke Inggris termasuk dari sesama negara anggota, tentunya hal ini akan mendapatkan pertentangan dari anggota-anggota Uni Eropa karena tidak sesuai dengan prinsip *freedom of movement*.

Partai UKIP berpandangan jalan satu-satunya agar Inggris bisa mengontrol laju imigrasi dengan ketat maka harus keluar dari Uni Eropa, karena selama Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa maka Inggris tidak bisa menentukan sendiri kebijakannya terhadap imigrasi, bahkan muncul wacana Uni Eropa akan membuat sistem kuota untuk mengatur laju imigrasi yang terus membanjiri kawasan Eropa, hal ini tentunya akan semakin menjadi beban bagi Inggris karena harus menerima kuota

yang ditetapkan oleh Uni Eropa, sikap tegas Partai UKIP agar Inggris keluar dari Uni Eropa disampaikan oleh Nigel Farage dalam pidatonya sebagai berikut :

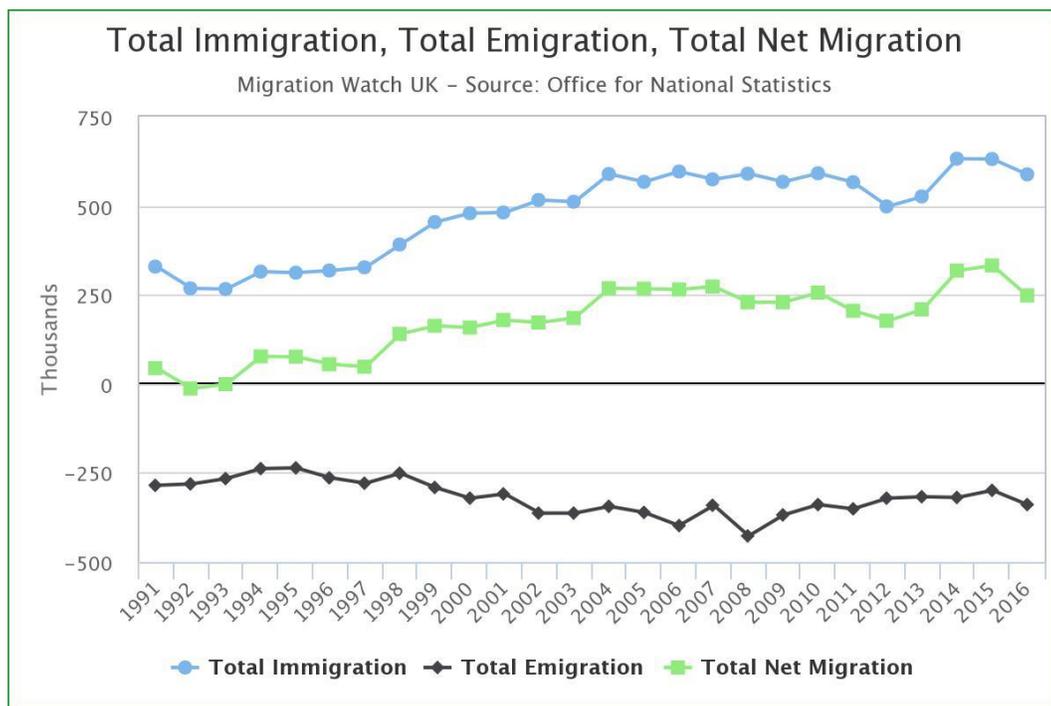
“If we are to leave the EU this issue must be at the front and centre of the Brexit campaign, the only way we can control immigration is by leaving the EU, and We should not have to pay for the EU’s and Mrs Merkel’s errors.” (Hall, 2016)

Pidato Nigel Farage tersebut menggambarkan bahwa isu imigrasi merupakan topik utama yang dijadikan pembahasan antara hubungan Uni Eropa dan Inggris selain isu uang kontribusi, Nigel Farage juga memberikan statement bahwa ada sekitar 26 juta orang di Eropa sedang mengejar lapangan pekerjaan, salah satunya lapangan pekerjaan yang tersedia di Inggris, tentunya hal ini akan menimbulkan persaingan warga lokal dan para imigran (DW, 2014). UKIP mendorong Inggris harus bertindak strategis dan rasional, hal ini sesuai dengan asumsi John J Mearsheimer tentang organisasi internasional, oleh karena itu keluar dari Uni Eropa dengan polemik permasalahan uang kontribusi dan imigrasi merupakan alasan yang rasional agar Inggris keluar dari Uni Eropa dan bisa menentukan kebijakannya sendiri untuk menangani permasalahan imigrasi yang terus meningkat.

Sejak dua puluh tahun terakhir jumlah imigran yang memasuki Inggris terus meningkat, pada tahun 2016 jumlah total imigran yang masuk ke Inggris sekitar 600.000 ribu orang namun apabila dikurangi dengan jumlah emigrasi pada tahun tersebut sebesar 340.000 orang, maka sebenarnya jumlah pasti imigran yang masuk ke Inggris hanya sekitar 260.000 ribu orang saja, angka ini mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya yang masih diatas angka 300.000 ribu orang (Migration Watch UK, 2017), sebagaimana digambarkan tingkat imigrasi dan emigrasi di Inggris oleh grafik sebagai berikut :

Gambar 4.4 Statistika Tingkat Imigrasi dan Emigrasi di Inggris



Sumber : Migrationwatch UK, *UK Growing Immigrations*, Published Juli 2017

Apabila melihat grafik tersebut maka rata-rata tiap tahunnya akan ada sekitar 190.000 imigran yang masuk ke Inggris, bahkan Office for National Statistics memprediksikan 20 tahun kedepan total populasi di Inggris akan menjadi 70 juta jiwa (The Telegraph, 2017). Semakin banyaknya imigran yang masuk ke Inggris dengan motif untuk mencari pekerjaan, rata-rata mereka bekerja menjadi buruh industri maka memberikan dampak bagi pekerjaan dan upah di Inggris, untuk periode 2007-2016

menemukan bahwa kenaikan 1 persen imigran pada populasi usia kerja di Inggris menurunkan upah rata-rata 0,3 persen, dalam sektor jasa selama 2009-2016 menemukan bahwa kenaikan 1 persen imigran mengurangi upah rata-rata 0,5 persen (Full Fact, 2017). Selain itu, dengan semakin banyaknya imigran yang masuk ke Inggris Partai UKIP berpandangan bahwa hal tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial lainnya yaitu terkait akan semakin berkurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, properti, dan pelayanan kesehatan bagi warga lokal Inggris.

